

# Artikel Program Padat Karya Tunai Desa\_Turnitin-1.docx

*by* Turnitin Checking

---

**Submission date:** 12-Apr-2026 02:40PM (UTC+0900)

**Submission ID:** 2928905453

**File name:** Artikel\_Program\_Padat\_Karya\_Tunai\_Desa\_Turnitin-1.docx (140.85K)

**Word count:** 5698

**Character count:** 39025

## Effectiveness of the Village Cash-Intensive Labor Program in Community Empowerment in Dukuhsari Village, Sidoarjo Regency

### [Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dukuhsari, Kabupaten Sidoarjo]

Ineke Desi Natalia<sup>1)</sup>, Hendra Sukmana<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [hendra.sukmana@umsida.ac.id](mailto:hendra.sukmana@umsida.ac.id)

**Abstract.** This research is a qualitative descriptive study that aims to analyze a situation or phenomenon by providing an explanation through descriptions that are in accordance with the facts that occur in the field. The technique of determining informants in this study uses purposive sampling, namely the technique of selecting sources or informants who are selected based on certain considerations. The results of this study use four indicators of program effectiveness taken from Budiani (2018), the first: the accuracy of program targets, that in the indicator of the accuracy of program targets it is still said to be inappropriate because there is no structured initial verification mechanism to ensure that all residents meet the criteria. Second, the indicator of program socialization, that in the indicator of program socialization it is appropriate and no deviations are found. Third, the indicator of the suitability of program objectives, that the Dukuhsari PKTD is not fully appropriate, because, although the short-term objectives of the PKTD in Dukuhsari Village are met, the achievement of long-term objectives is still weak. Fourth, Program Monitoring and Evaluation is still said to be inappropriate. Monitoring practices in Dukuhsari Village still focus a lot on technical and administrative matters.

**Keywords** - Effectiveness; PKTD; Community Empowerment

**Abstrak.** Kajian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif yang ditujukan guna menelaah suatu keadaan atau fenomena dengan memberikan penjelasan melalui deskripsi yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, Teknik penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan narasumber atau informan yang dipilih berlandaskan pertimbangan tertentu. Hasil penelitian ini menggunakan empat indikator efektivitas program yang diambil dari Budiani (2007), yang pertama: ketepatan sasaran program, bahwa dalam indikator ketepatan sasaran program masih dikatakan belum sesuai karena tidak adanya mekanisme verifikasi awal yang terstruktur untuk memastikan seluruh warga yang memenuhi kriteria. Kedua, indikator sosialisasi program, bahwa pada indikator sosialisasi program sudah sesuai dan tidak ditemukan penyimpangan. Ketiga, indikator Kesesuaian tujuan program, bahwa PKTD Dukuhsari belum sepenuhnya sesuai, dikarenakan, meskipun tujuan PKTD di Desa Dukuhsari jangka pendek terpenuhi, ketercapaian tujuan jangka panjang masih lemah. Keempat, Pemantauan dan Evaluasi Program masih dikatakan belum sesuai. Praktik pemantauan di Desa Dukuhsari masih banyak berfokus pada hal teknis dan administratif.

**Kata Kunci** - Efektivitas; PKTD; Pemberdayaan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan merupakan cita-luhur bangsa Indonesia, dengan desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. UU No 6 Tahun 2014 mengenai Desa memberi otonomi luas bagi desa untuk mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berlandaskan prakarsa, hak asal-usul, serta tradisi. Kebijakan ini membuka peluang untuk desa agar mandiri mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan daya beli. Namun, optimalisasi pembangunan desa masih menghadapi tantangan, salah satunya pola ketergantungan masyarakat terhadap bantuan langsung pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai [1]. Ketergantungan berlebih pada bantuan pemerintah menghambat kemandirian rumah tangga pedesaan. Akses modal mata pencaharian (pendapatan, keterampilan, aset) lebih penting mengurangi kemiskinan daripada pemecahan sumber pendapatan saja [2].

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan PKTD sebagai bentuk konkret dari pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. PKTD diartikan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan tenaga kerja lokal secara langsung dengan sistem upah harian guna meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur desa [3]. Program ini menekankan pada penggunaan sumber daya manusia desa sebagai aktor utama pembangunan, sehingga tidak sekadar difokuskan pada hasil fisik, namun turut berfokus pada eskalasi kesejahteraan serta penguatan kapasitas masyarakat secara berkesinambungan [4].

Pelaksanaan PKTD berpijak pada fondasi regulasi yang kokoh. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan mandat terkait pemanfaatan Dana Desa untuk aktivitas pembangunan yang berbasis pada skema padat karya tunai. Di samping itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 mengenai penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 secara lugas menempatkan alokasi anggaran untuk pembiayaan PKTD sebagai prioritas utama [5]. Kerangka regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memosisikan PKTD sebagai program strategis pemberdayaan masyarakat desa. Agenda ini tidak sekadar memfasilitasi ketersediaan lapangan pekerjaan bagi individu yang tidak bekerja serta setengah penganggur, melainkan juga mengokohkan nilai kebersamaan, kemandirian, serta spirit gotong royong dalam lingkungan sosial [6]. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan PKTD, masyarakat desa, khususnya kelompok rentan, memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka. Sejalan dengan itu, dana yang diterima masyarakat desa dapat dipandang sebagai pembentukan modal yang mampu meningkatkan produksi barang pada periode berikutnya [7].

Pelaksanaan PKTD telah dilakukan di seluruh desa di Indonesia, termasuk di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Program ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan melibatkan masyarakat setempat dalam setiap tahap pelaksanaannya. Pada tahun 2024, tercatat peningkatan pendapatan rata-rata peserta sebesar 38% menjadi Rp1,65 juta per bulan, tingkat pengangguran menurun hingga 5,8%, dan infrastruktur desa mengalami perbaikan dengan selesainya pembangunan jalan sepanjang 2,5 km. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial juga berkurang sebesar 15% (Laporan KPMD Dukuhsari, 2024). Data tersebut memperlihatkan bahwasannya PKTD berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Selain memperkuat ekonomi masyarakat, PKTD juga berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sosial desa. Berlandaskan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan program, rincian penggunaan anggaran PKTD di Desa Dukuhsari disajikan dalam tabel berikut untuk menunjukkan perbandingan antara target kegiatan, realisasi capaian, persentase keberhasilan, serta durasi pelaksanaan program pada periode 2022–2024.

**Tabel 1.** Target dan Realisasi Program Pembangunan Desa Dukuhsari

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Waktu Pelaksanaan (Mulai-Selesai)
1	2022	Pembangunan jalan lingkungan permukiman	1,5 KM	1,4 KM	93%	Jan 2022-Juni 2022
		Rehabilitasi balai desa	1 unit	1 unit	100%	Oktober 2022 – Des 2022
2	2023	Pembangunan jalan desa	2 KM	1, 5 KM	90%	Feb 2023 – Agustus 2023
		Pembangunan makam desa	1 lokasi	1 lokasi	100%	Mei 2023 – Juli 2023
3	2024	Pengerasan jalan permukiman	1,5 KM	1 KM	90%	Jan 2024 – April 2024
		Pembangunan Balai RW	1 unit	1 unit	100%	Maret 2024 – Oktober 2025

*Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Dukuhsari, 2025*

Merujuk pada paparan Tabel 1, teridentifikasi bahwasannya mayoritas aktivitas pembangunan melalui skema PKTD di Desa Dukuhsari selama rentang tahun 2022–2024 mencatatkan indeks capaian yang signifikan, yakni pada

kisaran 90% hingga 100%. Realitas ini merepresentasikan bahwa secara umum, program tersebut berhasil diimplementasikan melalui efektivitas yang memadai di level desa. Namun demikian, terdapat sejumlah kegiatan yang belum memenuhi target perencanaan secara utuh. Fenomena ini dipicu oleh beragam determinan, meliputi restriksi durasi pelaksanaan pada satu tahun anggaran, hambatan teknis berupa anomali cuaca serta ketersediaan bahan baku, hingga keterbatasan jumlah tenaga kerja setempat. Di samping itu, modifikasi terhadap realitas medan serta pergeseran prioritas pembangunan desa turut memengaruhi volume pekerjaan. Seluruh faktor tersebut membuktikan bahwasannya eksekusi program sangat dipengaruhi oleh dinamika lapangan yang bersifat fluktuatif.

Sejumlah penelitian terdahulu turut mengkaji efektivitas PKTD. Penelitian Pertama oleh Julianti Prihatini, Dimas Pratama, dan I Made Aldy Wijaya (2024) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara” Hasil Penelitian memperlihatkan bahwasannya proses pelaksanaan program PKTD berhasil melalui pelatihan berbasis pertanian dan perikanan serta pendampingan intensif bagi warga sehingga pemberdayaan dinilai berhasil, meskipun seleksi lokasi dan sosialisasi belum optimal akibat rendahnya partisipasi selama pandemi [8].

Penelitian kedua oleh Dandan Haryono dan Evi Silviana (2023) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Padat karya Tunai Desa (PKTD) Dari Dana Desa Di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya” riset mengindikasikan bahwasannya tahap seleksi lokasi serta sosialisasi dalam empat fase pemberdayaan belum berjalan melalui hasil yang baik. Kendala utama pada kedua tahap tersebut ialah rendahnya keterlibatan publik dalam menjalankan serta kurangnya penyampaian data maupun informasi secara komprehensif kepada warga [9].

Penelitian ketiga oleh Feri (2024) melalui judul “Efektivitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ulubalang Kabupaten Bone” hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya Program padat karya terbukti berjalan secara optimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa, khususnya di Desa Ulubalang. Program ini mampu meningkatkan akses ekonomi masyarakat serta memperbaiki akses terhadap fasilitas infrastruktur seperti jalan dan jembatan [10].

Melalui observasi lapangan, teridentifikasi sejumlah problematika terkait efektivitas PKTD di Desa Dukuh Sari. Pertama, terdapat ketidakjelasan pada tata kelola serta optimalisasi proses seleksi partisipan yang berisiko menghalangi keterlibatan masyarakat secara komprehensif. Kedua, muncul tantangan pada dimensi keberlanjutan pascapenyelesaian proyek fisik, mengingat belum tersedianya mekanisme formal guna memelihara eskalasi kapasitas serta kemandirian warga. Ketiga, minimnya aktivitas pemantauan serta evaluasi setelah program berakhir mengakibatkan kendala teknis tidak teridentifikasi, sehingga mereduksi peluang perbaikan berkesinambungan. Rentetan isu tersebut merangsang urgensi perbaikan pada berbagai aspek manajerial program secara menyeluruh.

Riset ini mengadopsi teori efektivitas program yang dipopulerkan oleh Budiani (2007) dalam Melati (2021), yang mengintegrasikan empat variabel fundamental: (1) ketepatan sasaran program, (2) sosialisasi program, (3) kesesuaian tujuan program, serta (4) pemantauan program [11]. Keempat variabel tersebut berfungsi sebagai kerangka analisis fundamental guna mengevaluasi sejauh mana implementasi PKTD di Desa Dukuh Sari berlangsung efektif pada merealisasikan tujuan pemberdayaan masyarakat. Pemilihan kerangka ini didasarkan pada relevansinya dalam mengukur parameter keberhasilan program yang berbasis pada partisipasi publik.

Secara teoritis, penelitian ini tidak hanya menggunakan teori efektivitas program dari Budiani (2018) sebagai kerangka analisis, tetapi juga menguji relevansi indikatornya dalam konteks PKTD di tingkat desa. Hasil observasi awal menunjukkan adanya aspek penting seperti keberlanjutan manfaat program setelah proyek selesai yang belum tercakup secara eksplisit dalam empat indikator tersebut. Temuan ini mengindikasikan adanya celah teoritis yang perlu diperluas agar teori efektivitas program lebih adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan memberikan pengayaan pada indikator efektivitas program melalui penyesuaian konteks penerapan teori, sehingga memperluas pemahaman akademik mengenai efektivitas program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Melalui kondisi tersebut, riset ini diorientasikan agar mampu menyumbangkan kontribusi secara akademik serta praktis.

Merujuk pada paparan tersebut, riset ini ditujukan guna membedah serta mendeskripsikan efektivitas PKTD pada pemberdayaan masyarakat di Desa Dukuh Sari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo berpijak pada empat indikator efektivitas menurut Budiani (2007). Sasaran ini diharapkan mampu menyajikan visualisasi yang menyeluruh terkait implementasi program di level desa.

## II. METODE

Riset ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang diorientasikan guna memaparkan fenomena secara mendalam serta sistematis agar lebih mudah dimaknai. Pendekatan tersebut diterapkan untuk membedah kondisi objektif berlandaskan fakta lapangan, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama pada proses pengumpulan data [12]. Lokasi penelitian bertempat di Desa Dukuh Sari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan atas dasar adanya problematika efektivitas PKTD bagi pemberdayaan masyarakat. Fokus kajian merujuk

pada empat parameter efektivitas menurut Budiani (2007), mencakup ketepatan sasaran, sosialisasi program, keselarasan tujuan, serta aktivitas pemantauan serta evaluasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni metode pemilihan subjek berlandaskan kriteria tertentu yang relevan melalui tujuan penelitian, [13]. total informan berjumlah 4 individu, meliputi Kepala Desa, dua perangkat desa pelaksana PKTD, serta satu warga penerima manfaat. Basis pemilihan didasarkan pada aspek pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam siklus program.

Penghimpunan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, serta studi literatur. Analisis data menerapkan model interaktif Miles serta Huberman yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan atau verifikasi [14]. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber serta teknik melalui cara membandingkan informasi dari beragam informan serta mengintegrasikan hasil dari berbagai metode pengumpulan data. Melalui pendekatan tersebut, riset ini berupaya memaparkan efektivitas PKTD pada pemberdayaan masyarakat Desa Dukuh Sari secara sistematis serta mendalam berlandaskan data kualitatif yang valid serta kredibel.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Riset ini mengadopsi teori efektivitas program dari Budiani (2007) sebagai landasan analisis pada mengevaluasi sejauh mana implementasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD) berlangsung efektif bagi pemberdayaan masyarakat. Teori tersebut menakar efektivitas melalui empat parameter kunci: (1) ketepatan sasaran, yakni tingkat kesesuaian peserta melalui kriteria program; (2) sosialisasi program, terkait kualitas diseminasi informasi serta pemahaman tujuan; (3) kesesuaian tujuan, yang merepresentasikan ketercapaian hasil pada jangka pendek serta panjang; serta (4) pemantauan serta evaluasi, yaitu intensitas pengawasan guna menjamin keberlangsungan manfaat. Keempat indikator ini memiliki keterkaitan logis: akurasi sasaran menjadi fondasi agar distribusi manfaat menjangkau kelompok prioritas; sosialisasi berperan pada memastikan partisipasi publik; kesesuaian tujuan mencerminkan realisasi capaian; serta fungsi monitoring-evaluasi menjaga keberlanjutan dampak. Struktur teoretis tersebut menjadi basis utama dalam membedah temuan lapangan di Desa Dukuh Sari.

#### A. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran menjadi elemen determinan bagi efektivitas program merujuk pada pemikiran Budiani (2007), dikarenakan hal ini mengukur konsistensi antara penerima manfaat melalui ketentuan sasaran yang ditetapkan. Variabel ini difungsikan sebagai tolok ukur primer pada menilai pencapaian program pemberdayaan kolektif. Terkait implementasi PKTD di Desa Dukuh Sari, tahapan penentuan peserta masih bersifat elementer serta informal. Berlandaskan keterangan perangkat desa, proses rekrutmen pekerja dilakukan melalui pertimbangan domisili serta jenis aktivitas fisik tanpa didukung mekanisme verifikasi yang ketat. Kondisi tersebut mengindikasikan penerapan strategi taktis yang lebih mengutamakan kelancaran operasional ketimbang kepatuhan administratif. Bapak Kunto yang menjabat sebagai kaur perencanaan memberikan pernyataan:

*“Sebenarnya nggak ada prosedur formal yang rumit. Kalau ada pembangunan di suatu dusun, otomatis warga dusun tersebut sendiri yang dilibatkan jadi pekerja program PKTD. Kalau proyeknya pembangunan infrastruktur seperti bangunan, pemilihannya dilihat dari kemampuan soalnya nggak semua orang bisa jadi tukang atau kuli bangunan. Tapi kalau kegiatannya cuma normalisasi saluran irigasi, ya kriterianya nggak ketat. Siapa saja yang mau ikut bisa, karena sifatnya seperti bersih-bersih saluran air.” (Wawancara, 7 Agustus 2025)*

Hal tersebut diperkuat melalui pernyataan sekretaris desa yang menguraikan bahwasannya ketiadaan mekanisme verifikasi formal menjadi realitas sebelum inisiasi program dilaksanakan. Sekretaris desa memaparkan bahwasannya:

*“Kalau verifikasi khusus sih nggak ada, Mbak. Biasanya kita langsung milih warga yang kelihatan masuk kategori rentan miskin, jadi ya lebih gampang dan cepat juga prosesnya. Kadang juga diprioritaskan yang rumahnya dekat sama lokasi proyek. Terus, soal administrasi kayak fotokopi KTP itu biasanya baru diminta setelah pekerjaannya selesai, buat kelengkapan laporan aja.” (Wawancara, 7 Agustus 2025)*

Mekanisme tersebut memang mengakselerasi proses rekrutmen, namun berimplikasi pada reduksi akurasi dalam menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Konsekuensinya, muncul probabilitas bahwa sebagian warga yang memenuhi kualifikasi justru tidak terakomodasi dalam program tersebut. Pola seleksi yang bersifat praktis serta menitikberatkan pada faktor jarak maupun simplifikasi koordinasi berisiko menafikan prinsip pemerataan serta ketepatan sasaran. Kondisi ini menegaskan urgensi pembenahan sistem seleksi agar lebih berorientasi pada data serta kriteria yang terukur.

**Tabel 2.** Jenis Kegiatan PKTD Desa Dukuhsari

Proyek	Jumlah tenaga kerja (Orang)
Pembangunan jalan dusun	50
Pembangunan posyandu	50
Pembangunan saluran drainase	12
Pembangunan makam baru dusun dukuhsari 2	30
Pembangunan drainase	12
Normalisasi saluran irigasi	10
Normalisasi sungai golongdoro	10
Total	174

*Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Dukuhsari, 2025*

Data yang tersaji dalam Tabel 2 mengonfirmasi bahwa Program PKTD mampu membuka akses pekerjaan jangka pendek bagi masyarakat desa dalam jumlah signifikan. Akan tetapi, keterlibatan massa yang besar belum mencerminkan keberhasilan program pada menjangkau sasaran secara tepat. Fenomena ini terjadi akibat pola rekrutmen yang masih berlangsung secara informal melalui jalur perangkat desa serta ketua lingkungan. Pengambilan keputusan terkait kepesertaan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas pemilih, sehingga belum mengintegrasikan sistem seleksi yang bersumber pada data valid. Oleh karena itu, proses penentuan subjek penerima manfaat belum mengacu secara konsisten pada infrastruktur data kesejahteraan sosial, termasuk DTKS, guna menjamin ketepatan sasaran sesuai regulasi'.

Merujuk pada fakta di atas serta jika dikorelasikan melalui teori Budiani (2007), fenomena tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan pemenuhan indikator ketepatan sasaran secara komprehensif. Budiani menekankan urgensi proses pendataan, penentuan kriteria, serta verifikasi yang transparan agar inisiatif program benar-benar menjangkau kelompok target yang relevan. Ketiadaan mekanisme verifikasi yang terstruktur mengindikasikan adanya risiko ketimpangan akses serta peluang bagi masyarakat kurang mampu yang seharusnya menempati skala prioritas utama.

Mengacu pada data di atas, korelasi melalui teori Budiani (2007) memperlihatkan bahwasannya implementasi program belum memenuhi standar ketepatan sasaran secara utuh. Budiani menggarisbawahi bahwa manajemen pendataan serta verifikasi yang jelas merupakan prasyarat agar program mampu menjangkau kelompok kepentingan yang relevan. Ketiadaan instrumen verifikasi yang baku mengisyaratkan adanya potensi ketidakmerataan peluang bagi kelompok ekonomi lemah yang seharusnya diprioritaskan dalam program tersebut.

Ditinjau dari perspektif kebijakan, kondisi ini memperkuat perlunya penguatan kompetensi perangkat desa terkait manajemen data sosial serta adopsi basis data kemiskinan yang valid bagi landasan program. Otoritas desa perlu mengonstruksi sistem rekrutmen yang lebih akuntabel serta inklusif, seperti penyelenggaraan musyawarah desa guna melakukan verifikasi bersama terhadap kandidat peserta. Melalui langkah strategis ini, pelaksanaan program akan mampu mencapai keseimbangan antara efisiensi waktu, ketepatan distribusi manfaat, serta prinsip kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Problematika yang serupa teridentifikasi pada studi Juliati Prihatini dkk di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang memaparkan bahwa fase penentuan lokasi serta rekrutmen peserta belum

terimplementasi secara presisi sehingga berdampak pada efektivitas program pemberdayaan. Komparasi tersebut memberikan bukti bahwa isu ketidaktepatan sasaran bukan merupakan fenomena tunggal di Desa Dukuhsari, melainkan representasi dari tantangan struktural yang kerap ditemui pada operasionalisasi PKTD di berbagai daerah.

### B. Sosialisasi Program

Mengacu pada teori efektivitas Budiani (2007), sosialisasi menduduki peran penting sebagai instrumen keberhasilan program. Sosialisasi didefinisikan sebagai kecakapan penyelenggara dalam mentransfer informasi mengenai tujuan serta prosedur teknis agar publik dapat memahami serta memanfaatkan program secara optimal. Kualitas sosialisasi tidak hanya diukur dari aspek jangkauan informasi, melainkan melalui sejauh mana masyarakat mampu menyerap esensi tujuan, kemanfaatan, serta alur pelaksanaan yang ditetapkan dalam model kebijakan tersebut.

Pelaksanaan diseminasi informasi mengenai Program PKTD di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, ditempuh melalui mekanisme formal dalam forum desa semisal Musrenbang serta rapat koordinasi tingkat RT/RW secara berkelanjutan. Metode sosialisasi melalui pertemuan langsung ini mendukung terciptanya dialog interaktif, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk berdiskusi serta menyampaikan aspirasi secara instan guna memperdalam pemahaman kolektif mengenai program. Sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris desa bahwasannya:

*“Jadi waktu pertama kali ada PKTD itu kita kasih tahu ke warga lewat forum MUSRENBANG, Mbak. Sampai sekarang pun kalau ada pembangunan yang melibatkan PKTD biasanya tetap diumumkan lewat MUSRENBANG atau rapat di tingkat RT/RW. Di forum-forum itu kita jelasin secara rinci, mulai dari rencana pembangunan yang bakal dijalankan sampai peluang kerja apa saja yang bisa diikuti warga. Jadi biar semua orang paham, informasi selalu dibuka di rapat supaya nggak ada yang ketinggalan.” (Wawancara tanggal 07 Agustus 2025)*

Temuan wawancara mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk Desa Dukuhsari memaknai PKTD sebagai inisiatif yang memfasilitasi peluang perolehan pendapatan komplementer. Persepsi tersebut terbangun sebagai dampak dari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara periodik serta konsisten melalui berbagai forum desa. Realitas ini terjustifikasi melalui visualisasi data pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1.** Pelaksanaan MUSRENBANG di Desa Dukuhsari

*Sumber:* Diolah dari Pemerintah Desa Dukuhsari, 2025

Melalui keberadaan forum seperti Musrenbangdes, masyarakat tidak sekadar menjadi penerima informasi pasif, melainkan memiliki ruang untuk mengartikulasikan aspirasi serta memberikan kontribusi pemikiran terkait perencanaan program. Oleh sebab itu, ketersediaan wadah resmi tersebut memperkokoh efektivitas PKTD pada dimensi sosialisasi, walaupun dalam realitasnya mayoritas warga masih lebih dominan mengakses informasi melalui kanal informal di lingkup RT/RW.

Warga yang aktif mengikuti kegiatan desa memperoleh informasi langsung mengenai tujuan dan mekanisme program. Seorang warga mengungkapkan:

*“Saya biasanya ikut rapat RW kalau diajak sama Pak RT, jadi bisa tahu langsung kalau ada proyek dari desa. Dari situ juga sekalian dikasih tahu peluang kerja yang bisa diikuti warga. Informasinya biasanya disampaikan langsung sama ketua RW atau perangkat desa, jadi jelas dan gampang dipahami. Makanya saya jadi ngerti tujuan program ini, soalnya penjelasannya memang langsung dibicarakan di rapat.” (Wawancara tanggal 10 Agustus 2025)*

Temuan ini memperlihatkan bahwasannya sosialisasi berhasil menjangkau dan memberikan informasi kepada masyarakat sasaran. Jika dikaitkan dengan teori Budiani (2007), pelaksanaan sosialisasi sudah sesuai dengan indikator efektivitas program, karena dilakukan secara terbuka, rutin, dan konsisten melalui forum resmi desa. Meskipun metode yang digunakan masih terbatas pada tatap muka, penyebaran informasi secara sosial tetap membuat akses relatif merata.

Temuan ini memperlihatkan bahwasannya efektivitas sosialisasi PKTD sangat dipengaruhi oleh tingkat keaktifan masyarakat dalam mengikuti forum-forum desa. Masyarakat yang jarang hadir berpotensi tertinggal informasi, sehingga partisipasi mereka dalam program menjadi rendah. Terbatasnya metode sosialisasi juga menjadi catatan, karena belum memanfaatkan media alternatif seperti papan informasi digital, media sosial, atau selebaran yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya pemerintah desa memperluas strategi sosialisasi dengan pendekatan multikanal agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak aktif dalam forum desa. Langkah ini akan meningkatkan inklusivitas dan memastikan semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dandan Haryono dan Evi Silviana (2023) di Desa Cipakat yang menunjukkan efektivitas sosialisasi melalui forum tatap muka dalam meningkatkan pemahaman warga aktif terhadap program. Namun, di kedua desa, efektivitas masih bersifat parsial karena belum menyentuh masyarakat yang kurang aktif. Oleh karena itu, meskipun sosialisasi PKTD di Desa Dukuhsari dapat dikatakan cukup efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mendukung tujuan pemberdayaan, strategi komunikasi publik tetap perlu ditingkatkan agar dampaknya lebih merata.

### C. Kesesuaian Tujuan Program

Merujuk pada teori efektivitas program menurut Budiani (2007), kesesuaian tujuan program merupakan salah satu parameter fundamental efektivitas yang mengukur sejauh mana output yang terealisasi selaras melalui sasaran yang telah dikonstruksikan. Dalam lingkup PKTD, orientasi utamanya ialah menstimulasi pemberdayaan masyarakat desa, khususnya strata prasejahtera serta marginal, melalui aktivitas produktif yang mendayagunakan potensi sumber daya lokal, tenaga kerja setempat, serta teknologi tepat guna untuk mengeskalasi pendapatan serta taraf kesejahteraan.

Berlandaskan hasil observasi dan wawancara di Desa Dukuhsari, diketahui bahwa tujuan jangka pendek PKTD relatif berhasil tercapai. Salah seorang kaur perencanaan desa menyampaikan:

*“Alhamdulillah memang kerasa banget manfaatnya, soalnya warga yang ikut kerja bisa dapat tambahan penghasilan harian buat kebutuhan rumah tangga. Jadi selain ada kerjaan, mereka juga bisa langsung bawa pulang uang setiap hari. Terus, kebutuhan proyek kayak semen, pasir, atau bahan bangunan lain kebanyakan dibeli di warung sama toko yang ada di desa. Jadinya perputaran ekonomi di desa juga ikut jalan, nggak cuma orang yang kerja tapi pedagang lokal juga kena dampaknya.” (Wawancara tanggal 10 Agustus 2025).*

Pernyataan Pernyataan tersebut menunjukkan fakta bahwa program berhasil memberikan dampak nyata berupa tambahan penghasilan harian kepada warga. Namun, ketika dilihat dari sisi tujuan jangka panjang, capaian program menunjukkan keterbatasan. Berlandaskan penuturan kaur perencanaan desa, peningkatan keterampilan atau kapasitas kerja warga masih sangat terbatas. Beliau mengatakan:

*“Kalau soal peningkatan keterampilan kerja memang belum ada, Mbak, soalnya yang dipakai kebanyakan warga yang sudah punya keahlian jadi tukang bangunan. Jadi pas ada proyek langsung dikerahkan sesuai kemampuan masing-masing biar cepat selesai. Tapi kan nggak semua peserta itu tukang, ada juga warga yang sebenarnya nggak punya keahlian di bidang itu. Nah, buat yang bukan tukang ini memang belum dapat bekal tambahan setelah program selesai, jadi manfaatnya cuma terasa pas kerja aja.” (Wawancara tanggal 7 Agustus 2025).*

Temuan ini memperlihatkan bahwasannya pelaksanaan PKTD di Desa Dukuhsari lebih banyak mengandalkan tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan, terutama di bidang konstruksi. Strategi ini efektif dalam memastikan pekerjaan selesai tepat waktu dan sesuai standar, tetapi kurang memperhatikan pemberdayaan jangka panjang. Akibatnya, warga yang tidak memiliki keahlian belum mendapatkan manfaat berkelanjutan setelah program selesai. Dari sisi manfaat langsung, warga memperoleh penghasilan tambahan selama pelaksanaan program, yang membantu memenuhi kebutuhan ekonomi harian. Namun, tidak adanya pelatihan keterampilan baru atau pendampingan pascaprojek membatasi dampak program pada jangka pendek saja.

Berlandaskan hasil observasi lapangan dan data tenaga kerja pada pelaksanaan PKTD di Desa Dukuhsari, tercatat bahwa dari sekitar 32 orang pekerja yang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa, hanya sekitar 12 orang yang memiliki keterampilan sebagai tukang bangunan, sedangkan sekitar 20 orang lainnya merupakan tenaga kerja otodidak atau pekerja umum yang tidak memiliki keterampilan konstruksi khusus. Kondisi ini memperlihatkan bahwasannya jumlah tenaga kerja otodidak lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja yang memiliki keahlian teknis.

Temuan ini memperlihatkan bahwasannya pelaksanaan PKTD di Desa Dukuhsari lebih banyak mengandalkan tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan, terutama di bidang konstruksi. Strategi ini efektif dalam memastikan pekerjaan selesai tepat waktu dan sesuai standar, tetapi kurang memperhatikan pemberdayaan jangka panjang. Dominasi tenaga kerja yang bersifat otodidak juga menunjukkan adanya permasalahan yang masih menggantung, karena sebagian masyarakat mengantungkan kesempatan kerja dan sumber pendapatannya pada keberadaan program PKTD. Apabila program PKTD tidak berjalan, maka kelompok masyarakat ini tidak memiliki bekal keterampilan yang cukup untuk memperoleh pekerjaan serupa di luar program tersebut.

Berlandaskan fakta lapangan, apabila dikaitkan dengan teori efektivitas program menurut Budiani (2007), Budiani menegaskan bahwa indikator kesesuaian tujuan menilai keselarasan capaian dengan tujuan awal, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu, kesesuaian tujuan PKTD di Desa Dukuhsari belum sepenuhnya terpenuhi, sebab belum mengintegrasikan komponen pemberdayaan jangka panjang seperti pelatihan kerja atau pendampingan lanjutan. Fokus utama pemerintah desa masih pada penyelesaian fisik dan penyaluran bantuan ekonomi cepat, bukan penciptaan kapasitas baru yang meningkatkan kemandirian warga.

Implikasinya, setelah proyek berakhir, masyarakat terutama yang tidak memiliki keterampilan konstruksi kembali pada kondisi awal tanpa bekal tambahan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini menegaskan pentingnya strategi pendukung seperti pelatihan kerja berbasis proyek, pengembangan kewirausahaan lokal, dan pemanfaatan hasil pembangunan pascaprojek agar tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Setiawan & Megawati (2022) di Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwasannya PKTD telah memenuhi indikator efektivitas dalam membuka lapangan kerja sementara, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menumbuhkan budaya gotong royong. Namun, seperti di Desa Dukuhsari, aspek keberlanjutan belum tercapai karena lapangan kerja bersifat temporer dan tidak disertai pengembangan kapasitas atau pemeliharaan hasil pembangunan.

#### **D. Pemantauan dan Evaluasi Program**

Menurut Budiani (2007), indikator pemantauan dan evaluasi dalam efektivitas program mencakup kegiatan pengawasan dan penilaian setelah pelaksanaan program sebagai bentuk refleksi terhadap keberlanjutan dan dampaknya bagi peserta. Evaluasi pascaprogram juga memberi peluang untuk mengukur capaian, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan langkah perbaikan di masa depan. Artinya, kegiatan ini tidak hanya sebatas pengawasan teknis, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bersama untuk memastikan manfaat program berkelanjutan.

Di Desa Dukuhsari, pemantauan program PKTD dilakukan melalui TPK yang terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat. Berlandaskan hasil wawancara melalui sekretaris desa, menjelaskan bahwa:

*"Ada tim khusus dari desa yang namanya TPK, jadi tiap ada proyek mereka selalu datang ke lokasi. Hampir tiap hari TPK ini ngawasi langsung jalannya pekerjaan, biar sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Mereka juga mencatat siapa saja pekerja yang hadir lewat absensi harian, jadi lebih tertib. Selain itu, TPK juga memastikan pekerjaan yang dilakukan benar-benar sesuai rencana yang sudah disusun dari awal." (Wawancara, 7 Agustus 2025)*

Kegiatan pemantauan selanjutnya yaitu, dokumentasi hasil pemantauan biasanya disusun dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Hal ini dijelaskan langsung oleh sekretaris desa bagaimana prosesnya:

*"Semua kegiatan proyek itu dicatat lengkap, mulai dari absensi pekerja setiap hari, dokumentasi foto di tiap tahap pekerjaan, sampai bukti-bukti lapangan. Semua data itu kemudian dikumpulkan jadi satu dalam SPJ, yang nantinya dipakai sebagai catatan administrasi dan dasar pertanggungjawaban. Jadi kalau soal laporan, memang sudah lengkap dan rapi. Cuma kalau urusan evaluasi hasil pembangunan atau kinerja pekerja, biasanya dibahasnya internal saja sama perangkat desa, belum sampai dibuka ke masyarakat luas." (Wawancara, 7 Agustus 2025)*

Hal ini didukung oleh wawancara dengan kaur perencanaan desa dimana proses evaluasi formal setelah proyek selesai belum pernah dilakukan secara terstruktur:

*"Kalau evaluasi formal yang resmi gitu memang nggak ada. Jadi biasanya kalau ada masalah di lapangan baru ditindaklanjuti, contohnya waktu kemarin atap posyandu miring dan pas ada angin kenceng beberapa genteng sampai lepas. Nah, kejadian itu langsung saya sampaikan ke pekerja biar segera dibenerin. Selain itu juga saya ingatkan supaya bisa jadi acuan dan lebih diperhatikan lagi di proyek-proyek berikutnya." (Wawancara, 10 Agustus 2025)*

Pernyataan ini memperlihatkan bahwasannya evaluasi bersifat reaktif, hanya muncul ketika ada masalah teknis. Selain itu, evaluasi dilakukan dalam lingkup terbatas antara perangkat desa, sehingga pembelajaran yang dihasilkan tidak maksimal menyebar ke masyarakat penerima program. Dalam upaya pemberdayaan, cara seperti ini membatasi penyebaran keterampilan dan pengetahuan yang sebenarnya bisa dimiliki lebih banyak orang di desa [15].

Untuk melihat gambaran hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan PKTD yang telah dilaksanakan, berikut beberapa jenis kegiatan program beserta hasil evaluasinya berlandaskan temuan lapangan, dokumentasi desa, serta hasil wawancara dengan perangkat desa. Ringkasan tersebut tersaji tabel dibawah ini.

**Tabel 3.** Laporan Hasil Evaluasi Program PKTD Desa Dukuhsari

No	Jenis Program	Hasil Evaluasi
1	Pembangunan Jalan Desa	Program berjalan sesuai rencana dan memberikan tambahan pendapatan bagi warga yang terlibat sebagai pekerja. Namun realisasi volume pekerjaan belum sepenuhnya mencapai target karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan kondisi lapangan.
2	Normalisasi Saluran Drainase	Kegiatan berhasil memperbaiki fungsi saluran air di lingkungan desa serta melibatkan tenaga kerja lokal. Kendala yang ditemukan berupa keterbatasan peralatan kerja dan kondisi cuaca saat pelaksanaan.
3	Normalisasi Saluran Irigasi	Program melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembersihan dan perbaikan saluran irigasi sehingga meningkatkan partisipasi warga. Namun kegiatan ini bersifat sementara dan belum memberikan peningkatan keterampilan kerja bagi peserta.

4	Pembangunan Makam Desa	Kegiatan pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi fasilitas umum desa. Tenaga kerja sebagian besar berasal dari warga sekitar lokasi proyek.
5	Pembangunan Balai RW	Pembangunan Balai RW Program berhasil meningkatkan fasilitas sosial masyarakat dan melibatkan tenaga kerja desa. Namun evaluasi pascaprojek masih terbatas pada laporan administrasi tanpa forum evaluasi terbuka dengan masyarakat.

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Dukuhsari, 2025

Melihat fakta lapangan tersebut, jika dikaitkan dengan teori Budiani (2007), kondisi ini memperlihatkan bahwasannya indikator pemantauan dan evaluasi belum sepenuhnya terpenuhi. Seharusnya, evaluasi menjadi sarana partisipatif yang tidak hanya memastikan keberhasilan teknis, tetapi juga mendorong keberlanjutan manfaat sosial dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pelibatan warga dalam proses evaluasi memungkinkan mereka ikut menilai hasil, memahami kendala, dan berkontribusi dalam merumuskan solusi untuk program selanjutnya.

Implikasi dari praktik yang masih terbatas ini adalah penyebaran manfaat pengetahuan menjadi rendah. Warga yang tidak terlibat dalam evaluasi tidak memahami proses maupun hasil program, sehingga peluang untuk mengembangkan kapasitas mandiri menjadi terbatas. Program pun cenderung menghasilkan manfaat jangka pendek tanpa efek pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menerapkan evaluasi partisipatif sebagai bagian dari siklus PKTD, misalnya melalui forum musyawarah desa pascapelaksanaan yang terbuka untuk masyarakat. Selain itu, pendampingan teknis dari pemerintah daerah dapat membantu perangkat desa dalam menyusun indikator evaluasi yang menilai aspek teknis sekaligus keberlanjutan sosial dan peningkatan kapasitas warga.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Feri (2024) dalam studinya tentang efektivitas program padat karya di Desa Ulubalang, Kabupaten Bone. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwasannya pemantauan lebih difokuskan pada aspek teknis pembangunan dan kelengkapan administratif, sementara aspek pembelajaran partisipatif belum optimal. Kesamaan pola ini juga terlihat di Desa Dukuhsari, di mana pemantauan masih terbatas pada pencatatan absensi, dokumentasi, dan penyusunan SPJ tanpa evaluasi terbuka yang melibatkan masyarakat secara luas.

#### IV. SIMPULAN

Penelitian mengenai efektivitas PKTD di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya capaian dan keterbatasan. Dari indikator ketepatan sasaran, perekrutan tenaga kerja telah melibatkan keluarga rentan, namun masih dilakukan secara informal tanpa mekanisme verifikasi yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan bias kedekatan dan belum mencerminkan pemerataan sepenuhnya. Indikator sosialisasi program dinilai cukup efektif karena dilaksanakan melalui forum formal desa seperti Musrenbang dan rapat RT/RW, sehingga warga memperoleh pemahaman yang memadai tentang tujuan dan mekanisme PKTD. Pada indikator kesesuaian tujuan, capaian jangka pendek terlihat dari tambahan penghasilan warga dan perputaran ekonomi lokal, tetapi tujuan jangka panjang berupa peningkatan kapasitas kerja dan kemandirian belum tercapai akibat ketiadaan pelatihan atau pendampingan pascaprogram. Sementara itu, indikator pemantauan dan evaluasi telah berjalan melalui peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tetapi masih fokus pada aspek teknis dan administratif, dan evaluasi pascaprojek masih terbatas di lingkup perangkat desa.

Secara umum PKTD berperan dalam mendorong ekonomi lokal, tetapi masih lemah dalam pemberdayaan jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperbaiki mekanisme seleksi peserta berbasis data kemiskinan, merancang pelatihan bagi warga non-tukang, serta mengembangkan evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat. Penelitian ini terbatas pada satu desa dan sebagian besar data berasal dari wawancara perangkat desa dan warga. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi dan membandingkan implementasi PKTD di desa lain agar efektivitasnya dapat dinilai secara lebih komprehensif.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat serta kemudahan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih disampaikan kepada kedua orang tua atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang tiada henti. Apresiasi juga diberikan kepada dosen pembimbing atas arahan serta bimbingan selama proses penyusunan. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Pemerintah Desa Dukuhsari atas dukungan serta bantuan teknis selama penelitian, serta kepada rekan dan sahabat atas motivasi serta kebersamaan yang mendukung penyelesaian karya ini.

## REFERENSI

- [1] A. G. R. Budiasa, A. A. G. Raka, And I. M. Mardika, "Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (Pkt) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Lebih, Gianyar," *Public Inspir. J. Adm. Publik*, Vol. 4, No. 2, Pp. 71–82, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>
- [2] O. A. Onyeyirichi And M. G. Deepika, "Rural Multidimensional Poverty And Livelihood Mix: A Micro Level Study In Bihar, India," *Heliyon*, Vol. 11, No. 4, P. E42772, 2025, Doi: 10.1016/j.heliyon.2025.E42772.
- [3] m. a. r. i. a. n. a. Viollaz Et Al., *Community Effects Of Cash-For-Work Programmes In Jordan: Supporting Social Cohesion, More Equitable Gender Roles And Local Economic Development In Contexts Of Flight And Migration*, Vol. 22, No. 2, 2020. [Online]. Available: [Http://Dx.Doi.Org/10.23661/S103.2020https://Creativecommons.Org/Licenses/By/4.0/Www.Econstor.Eu%0ahttp://Www.Europeanjournalofsocialsciences.Com/](http://dx.doi.org/10.23661/S103.2020https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/www.econstor.eu%0ahttp://www.europeanjournalofsocialsciences.com/)
- [4] U. Endi And N. W. Widhiasthini, "Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Dirumuskan Bahwa Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pembangunan Nasional Salah," Vol. 5, Pp. 148–161, 2021.
- [5] Permendes, "Permendes Nomor 19 Tahun 2017," *Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Pengguna. Dana Desa Tahun 2018*, Pp. 1–67, 2017.
- [6] c. c. Jazuli, "Analisis Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)," *Inst. Agama Islam Negeri Ponorogo*, P. 159, 2021.
- [7] a. a. i. n. Marhaeni, I. K. Sudibia, G. Andika, And M. Fahlevi, "Impacts Of Village Funding On Community Empowerment And Poverty In Klungkung, Bali," *Int. J. Sustain. Dev. Plan.*, Vol. 19, No. 3, Pp. 981–990, 2024, Doi: 10.18280/ijstdp.190316.
- [8] J. Prihatini, D. Pratama, And I. M. A. Wijaya, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai Desa Di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara," *J. Abdi Masy. Indones.*, Vol. 4, No. 5, Pp. 1405–1414, 2024, Doi: 10.54082/Jamsi.1369.
- [9] D. Haryono, E. Silviana, And N. Nuraisyah, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Padat Karya Tunai Desa (Pktd) Dari Dana Desa Di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya," *J. Adm.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 87–94, 2022, Doi: 10.55100/Administrator.V4i2.50.
- [10] Feri, "Efektivitas Program Padat Karya Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ulubalang Kabupaten Bone," No. February, Pp. 4–6, 2024.
- [11] M. Melati And H. Zulkarnaini, "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian," *J. Publichuo*, Vol. 4, No. 1, P. 19, 2021, Doi: 10.35817/Jpu.V4i1.16021.
- [12] k. n. p. e. s. k. Anak, "Eksplorasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia," *Medan. Restu Print. Indones. Hal.57*, Vol. 21, No. 1, Pp. 33–54, 2008, Doi: 10.21831/Hum.V21i1.
- [13] D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. 2013.
- [14] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. 2008.
- [15] Y. F. Jepinus, "Pemberdayaan Dan Inovasi Untuk Kemandirian Desa," *Dianmas Bhakti J. Pengabd. Pada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Pp. 1–6, 2024, [Online]. Available: [File:///C:/Users/Hp\\_645/G1/Downloads/Dianmas+Bhakti+Hal+1-6.Pdf](file:///C:/Users/Hp_645/G1/Downloads/Dianmas+Bhakti+Hal+1-6.Pdf)

### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

# Artikel Program Padat Karya Tunai Desa\_Turnitin-1.docx

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Exeed College Student Paper	10%
2	archive.umsida.ac.id Internet Source	5%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1%
5	jurnal.perima.or.id Internet Source	<1%
6	Fathan, Budiman. "Manajemen Zakat Daerah di Provinsi Jawa Tengah (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, Karanganyar dan Banyumas).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) Publication	<1%
7	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1%
8	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	<1%
9	jamsi.jurnal-id.com Internet Source	<1%
10	eprints2.undip.ac.id Internet Source	<1%

11 Samrul, Hapid, Muhammad Hadis Badewi. "Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Angkutan Jalan dan Dampaknya Terhadap Perekonomian di Kabupaten Luwu Utara", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2025  
Publication

<1 %

12 repository.unsri.ac.id  
Internet Source

<1 %

13 digilibadmin.unismuh.ac.id  
Internet Source

<1 %

14 www.scribd.com  
Internet Source

<1 %

15 wardanipost.blogspot.com  
Internet Source

<1 %

16 Atun, Ariani. "Transformasi Asset - Based Community Development (ABCD) Dalam Meningkatkan Output Pada Pendidikan Menengah Kejuruan di SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Banyumas.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)  
Publication

<1 %

17 Muafah Nur Romadhoni, Isnaini Rodiyah. "Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Larangan", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2025  
Publication

<1 %

18 karya-ilmiah-mahasiswa.blogspot.com  
Internet Source

<1 %

19 masterasuransi.blogspot.com  
Internet Source

<1 %

20 ojs.uho.ac.id <1 %  
Internet Source

---

21 ojs.unigal.ac.id <1 %  
Internet Source

---

22 repo.stie-pembangunan.ac.id <1 %  
Internet Source

---

23 repository.upi.edu <1 %  
Internet Source

---

24 www.coursehero.com <1 %  
Internet Source

---

25 Amak Nasrul, Ilmi Usrotin Choiyirah. "Village-Owned Enterprises Development: HR Innovation Barriers in Ketapang Village, Sidoarjo", Indonesian Journal of Public Policy Review, 2025 <1 %  
Publication

---

26 Fadila Putri Arydianti, Lailu Mursyidah. "Village Roles in Tax Compliance: Suboptimal Mobilization and Limited Facilitation", Indonesian Journal of Public Policy Review, 2025 <1 %  
Publication

---

27 Submitted to Universitas Slamet Riyadi <1 %  
Student Paper

---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On